

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SUKOREJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN

Khumaidi, Lailatuz Zahro

Universitas Yudharta Pasuruan

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2024

Revised September 2024

Accepted September 2024

Available online September 2024

Email :

zahrolailatuz69@gmail.com

[m](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi program andalan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Payung hukum yang menjadi landasan yuridis program PKH adalah Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang memiliki tujuan pengentasan kemiskinan.

Melihat tujuan program PKH sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, tentu tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara pendamping program PKH dan KPM. Disinilah peran pendamping sosial yang diharapkan dapat mengawal program PKH agar betul-betul tepat sasaran serta dalam pencairan dana apakah dipergunakan sesuai dengan kebutuhan atau gaya hidup.

Sehingga peneliti mengambil fokus mengenai implementasi program keluarga harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan. guna keberhasilan PKH di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian ini pengimplementasian PKH telah memberikan dampak positif dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program ini membantu keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya bantuan tunai, keluarga dapat lebih fokus pada investasi dalam pendidikan anak dan perawatan kesehatan, yang pada gilirannya dapat membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam pengimplementasian PKH di Desa Sukorejo dapat dilihat dari jumlah orang yang kurang mampu, penerima bantuan yang sudah mendapatkan bantuan ada perubahan atau tidak.

Kata kunci : Implementasi PKH, Pengentasan Kemiskinan

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is the government's flagship program in prospering the community through the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. The legal umbrella that is the juridical basis of the PKH program is the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program which has the goal of poverty alleviation.

Seeing the objectives of the PKH program as regulated in the law, it will certainly not run optimally without good cooperation and coordination between PKH program assistants and KPM. This is where the role of social companions is expected to oversee the PKH program so that it is really on target and in the disbursement of funds whether it is used according to needs or lifestyles.

So the researchers focused on the implementation of the family hope program in efforts to eradicate poverty. for the success of PKH in Sukorejo Village, Sukorejo District, Pasuruan Regency. This research uses qualitative methods with a descriptive approach.

The results of this research are that the implementation of PKH has had a positive impact on poverty alleviation in Indonesia. This program helps poor families to meet their basic needs, such as education and health. With cash transfers, families can focus more on investing in their children's education and health care, which in turn can open up new economic opportunities and improve their quality of life. In implementing PKH in Sukorejo Village, it can be seen from the number of underprivileged people, whether there is a change in the number of aid recipients who have received assistance or not.

Keywords: PKH implementation, poverty alleviation

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kegagalan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat perlindungan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dalam pengukuran tingkat kemiskinan, terdapat dua jenis data yang digunakan: kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Kemiskinan makro menggunakan konsep "pendekatan kebutuhan dasar" dan pendekatan moneter, sedangkan kemiskinan mikro menggunakan konsep multi dimensi dan pendekatan non moneter. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah tingkat pendapatan minimum yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara dan digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi

Menurut World Bank dalam (Putri & Purnaweni, 2022), kemiskinan adalah suatu kondisi dimana terjadi kelaparan, kurangnya ketersediaan tempat tinggal, tidak adanya akses untuk berobat ke dokter ketika sakit, tidak adanya akses untuk mengenyam pendidikan, tidak bisa membaca, terjadi pengangguran, adanya kekhawatiran terhadap kondisi masa depan, kurangnya ketersediaan air bersih dan kurangnya kebebasan pada suatu kelompok masyarakat. Dengan kata lain, penyebab terjadinya kemiskinan adalah karena adanya faktor yang mendukung yaitu karena keterbatasan akses, pendapatan, pengeluaran yang banyak, rentan terhadap penyakit, sering terlibat dalam utang piutang dan pada beberapa situasi adalah masyarakat harus menjual barang miliknya untuk bertahan hidup (Kurniawan, Purnaweni dan Fathurrohman, 2015).

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Jarang ditemukan kemiskinan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seorang atau keluarga miskin biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti mengalami cacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau ketrampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (pensiun,



kesehatan, kematian) atau hidup dilokasi terpencil dengan sumberdaya alam dan infrastruktur yang terbatas. Secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor yaitu, faktor individual, faktor sosial, faktor kultural dan factor struktural.

Kemiskinan menjadi salah satu faktor dalam meningkatkankesenjangan disuatu daerah, terlebih bagi Kabupaten Pasuruan Sesuai dengan data sementara yang dihimpunoleh penulis dari Badan Pusat Stastika (BPS) Kabupaten Pasuruan, kini jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan mencapai 13,56 ribu jiwa. Bertambah 0,54ribu jiwa dibandingkan kondisi tahun lalu yang mencapai 13,02 ribu jiwa. "Persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dari 6,37 persen pada Maret 2022 menjadi sebesar 6,60 persen pada Maret 2023," ujar Kepala BPS Kota Pasuruan Sri Kadarwati.

Kecamatan Sukorejo di Kabupaten Pasuruan, tatanan kehidupan sosial masyarakatnya sangat majemuk, pendidikannya rata-rata mulai dari sekolah menengahatas sampai perguruan tinggi, pekerjaan masyarakat sebagian besar adalah petani yangpendapatannya masih rendah, banyaknya pengangguran dan para ibu ada yang menjaditulang punggung keluarga dikarenakan suami sudah meninggal dunia. Upaya untuk mengatasi kemiskinan di Kecamatan Sukorejo sudah dilakukan dengan berbagai program antara lain, pemberian bantuan PKH (Program Keluarga Harapan). Salah satuprogram khusus yang dikeluarkan pemerintah yakni Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan (Hasdiana, 2018).

Berdasarkan Peraturan Kementrian Sosial Nomer 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program perlindungan sosial yang diterapkan di Indonesia dengan tujuan membantu keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada Program Keluarga Harapan terdapat banyak bimbingan untuk peserta Program Keluarga Harapan yang bertujuan sebagai salah satu pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok dalam mengatasi kesulitan atau memecahkan masalah untuk mengentaskan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan hidup Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara Internasional di kenal sebagai program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebutberupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Program Keluarga Harapan ini dianggap Program yang berhasil. Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

Sebelumnya PKH di Desa Sukorejo sudah mulai berjalan sejak Tahun 2011 dengan harapan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dalam upaya pengentasan kemiskinan akan tetapi belum dapat sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara Internasional di kenal sebagai program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebutberupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Program Keluarga Harapan ini dianggap Program yang berhasil. Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan data tersebut data jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Desa Sukorejo pada tahun 2024 mencapai 195 orang, sedangkan pada tahun 2022 peserta penerima manfaat hanya berjumlah 152 orang dalam artian kurang waktu 2 tahun terdapat penambahan peserta baru yang berjumlah 43 orang, dalam hal ini peserta baru KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Desa Sukorejo semakin bertambah artinya masyarakat miskin semakin bertambah meskipun sudah terlaksana program keluarga harapan (PKH) yang bertujuan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di kantor Desa Sukorejo menurut keterangan dari operator kantor Desa Sukorejo dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Sukorejo, menemui beberapa kendala yang dialami diantaranya adalah : (1) Bertambahnya masyarakat kurang mampu atau miskin, dalam data 2 tahun terakhir ini ada penambahan peserta baru yang mana berjumlah 43 orang pada tahun 2022 berjumlah 152 penerima manfaat PKH sedangkan dalam tahun 2024 berjumlah 195 penerima manfaat PKH. (2) Banyak masyarakat yang tidak mampu tapi tidak tercover dalam BANSOS PKH dalam hal ini banyak masyarakat tidak mampu yg tidak tercover akan tetapi dari tim pendamping maupun pihak operator desa sudah pengajuan di DTKS lebih dari 60 orang. (3) DTKS yang dikeluarkan pemerintah juga tidak diperbarui atau belum di update yang dalam hal ini mengakibatkan penyaluran dana PKH ini tidak tepat sasaran. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini antara lain (1) Mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan (2) Mengetahui apa factor penghambat dan factor pendukung dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Sukorejo.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk beberapa pertimbangan pertama, metode kualitatif digunakan, dan penyesuaian metode kualitatif lebih mudah dalam banyak kenyataan. Kedua, metode ini memberikan inti dari hubungan peneliti-responden. Ketiga, metode ini lebih cocok untuk mempertajam pengaruh bersama dan pola nilai yang dihadapi. Riset kualitatif menyusun desain yang terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, tidak harus menggunakan desain yang telah ditumpuk secara kaku sehingga dapat diubah kembali.

Jenis atau tipe penelitian ini digunakan untuk mengukur manfaat penelitian bagi pengembangan konsep ilmiah, pengembangan keputusan, evaluasi kebijakan, atau kemajuan sebuah program. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi program keluarga harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo kabupaten pasuruan serta faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo kabupaten pasuruan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data peneliti menggunakan



model Miles dan huberman, yang terdiri dari tiga langkah dalam analisis data kualitatif yaitu : Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi adalah pelaksanaan dari sebuah produk kebijakan yang sudah dibuat, tetapi kadang kala kita cenderung menganggap sistem politik sebagai sebagai sesuatu yang menambah problem, dengan menarik garis pemisah antara kebijakan dan administrasi. Kebijakan yang sesuai akan mempengaruhi suatu implementasi program- program yang ada di Indonesia.terutama program PKH yang sudah menyebar di berbagai provinsi maupun tiap wilayah.

Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Pasal 6 ini mengatur proses penetapan penerima manfaat PKH, termasuk mekanisme verifikasi dan validasi, serta peran dan tanggung jawab Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengawasan program. Penetapan penerima manfaat berdasarkan hasil verifikasi memastikan bahwa bantuan PKH tepat sasaran dan diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan. Pembinaan dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak terkait bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program dan memastikan bahwa bantuan sosial digunakan dengan baik.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Perubahan kebijakan dalam upaya implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sering kali dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program tersebut. PKH adalah program bantuan sosial yang dirancang untuk mendukung keluarga miskin dengan memberikan bantuan tunai bersyarat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Berikut beberapa perubahan kebijakan yang mungkin terjadi dalam upaya implementasi PKH:

1. Penyesuaian kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
2. Perubahan dalam Mekanisme Penyaluran Bantuan
3. Penyesuaian Syarat dan Ketentuan
4. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi
5. Penyuluhan dan Pendidikan
6. Integrasi dengan Program lain

Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan PKH dengan kondisi sosial- ekonomi yang terus berkembang serta untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam implementasi program.

Menurut pandangan Grindle (1980:7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan



tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi Pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (policy stakeholders).

Dalam penelitian ini menggunakan model Grindle untuk menganalisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan studi di Kantor Desa Sukorejo. Yang mana dalam teori Grindle terdapat 2 poin dan 9 indikator yakni: 1) Isi Kebijakan (Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, Jenis manfaat yang dihasilkan, Derajat perubahan yang diinginkan, Kedudukan pembuat kebijakan, (Siapa) pelaksana kebijakan, dan Sumber daya yang dihasilkan). Poin yang ke 2) Konteks Implementasi (Kekuasaan, kepentingan, dan Strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa, dan Kepatuhan dan Daya Tanggap).

Kepentingan yang Terpengaruhi oleh Kebijakan Kepentingan Berbagai Pihak: Mengidentifikasi berbagai kelompok atau individu yang terlibat dalam kebijakan atau yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Ini termasuk kelompok yang langsung terlibat (misalnya, penerima manfaat program) dan kelompok yang mungkin terpengaruh secara tidak langsung (misalnya, masyarakat umum atau sektor industri terkait). Dalam hal ini peneliti memfokuskan terkait kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. Adanya program keluarga harapan (PKH) sangat berpengaruh besar pada masyarakat di Desa Sukorejo yang mana dalam hal ini keluarga yang tadinya kurang mampu menjadi sangat terbantu. Kepentingan pemerintah dalam pengimplementasian Program Keluarga Harapan di Desa Sukorejo ini sangat baik secara finansial sangat membantu para orang tua untuk bisa menyekolahkan anaknya sehingga bisa meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya tanpa memikirkan biaya lagi.

Dalam dimensi jenis manfaat merujuk pada kategori manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan untuk berbagai pihak atau kelompok yang terlibat. Grindle, dalam karyanya, menekankan pentingnya memahami bagaimana kebijakan mempengaruhi berbagai kepentingan dan bagaimana jenis manfaat ini dapat dibedakan. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana manfaat yang dihasilkan semenjak adanya program keluarga harapan (PKH), manfaat yang dihasilkan yaitu untuk mengurangi beban ekonomi, mendorong akses ke pendidikan dan kesehatan, meningkatkan partisipasi masyarakat, sinergi dengan program lainnya, penguatan kelembagaan desa.

Dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi jenis manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan, kita dapat lebih memahami dampak kebijakan tersebut terhadap berbagai kelompok dan mengevaluasi apakah kebijakan tersebut efektif dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwasannya manfaat yang dihasilkan semenjak adanya PKH yakni taraf hidup KPM meningkat, KPM bisa lebih mandiri lagi.

Derajat perubahan yang diinginkan merujuk pada seberapa besar perubahan yang diharapkan dari implementasi suatu kebijakan terhadap berbagai aspek kehidupan atau sistem yang terpengaruh. Indikator ini mengukur sejauh mana kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan perubahan yang diharapkan oleh pemangku kepentingan. Dalam ini peneliti ingin mengetahui derajat yang sudah berubah semenjak PKH ada, PKH telah menunjukkan hasil yang positif. Misalnya, bantuan tunai yang diterima oleh keluarga miskin digunakan untuk membeli kebutuhan pangan yang lebih bergizi, sementara anak-anak dari keluarga penerima PKH menunjukkan peningkatan untuk bisa sekolah lagi. Program ini juga mendorong keluarga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, sehingga mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Analisis dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya diimplementasikan tetapi juga mencapai perubahan yang diinginkan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwasannya derajat keluarga penerima manfaat di desa Sukorejo sudah sangat layak semenjak adanya bantuan Program Keluarga Harapan hal ini bisa dilihat dari segi kesehatan, pendidikan dan juga kesenjangan sosial berjalan dengan baik.

Kedudukan pembuat kebijakan mengacu pada bagaimana posisi dan peran pembuat kebijakan mempengaruhi proses dan hasil kebijakan. Kedudukan pembuat kebijakan mencakup pengaruh, kekuatan, dan legitimasi mereka dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan. Dalam hal ini hasil menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan yang mana pembuat kebijakan itu sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat sekitar. Di mulai dari tingkat RT/RW, Kasun, Perangkat desa dan juga Pendamping yang mengusulkan data-data nama calon penerima sesuai kriteria maka dalam pengambilan kebijakan bukan hak wewenang mereka akan tetapi kebijakan wewenang langsung dari Dinas Sosial. Kedudukan pembuat kebijakan berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan, mengukur sejauh mana pembuat kebijakan dapat mempengaruhi agenda kebijakan, mengusulkan perubahan, dan mendapatkan dukungan untuk kebijakan mereka.

Siapa pelaksana program adalah elemen penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan atau program dilaksanakan dalam praktik. Indikator ini fokus pada identifikasi, peran, dan kinerja pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Program Keluarga Harapan (PKH), pelaksana program yakni Pendamping PKH Desa memegang peran krusial untuk memastikan bahwa program ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui bantuan sosial bersyarat. Dengan menjalankan peran-

peran ini secara efektif, pelaksana program PKH dapat memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi keluarga yang membutuhkan.

Menurut teori Merilee S. Grindle, sumber daya yang dihasilkan dalam konteks kebijakan dan program berkaitan dengan jenis dan kualitas sumber daya yang tersedia sebagai hasil dari implementasi kebijakan. Ini mencakup berbagai bentuk sumber daya yang dapat diukur dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program atau kebijakan. Sumber daya finansial, sumber daya manusia dan sumber daya informasi juga sangat penting terhadap implementasi masyarakat. Dalam penelitian ini hasil menunjukkan sumber daya yang dihasilkan dari semenjak adanya Program Keluarga Harapan maka temuan peneliti yakni sumber daya pendidikan baik ada yang sampai sekolah perguruan tinggi ada juga yang menjadi PNS. Maka hal ini sangat berpengaruh baik sekali terhadap pendidikan. Dengan memahami dan memanfaatkan berbagai jenis sumber daya yang dihasilkan, pelaksana kebijakan dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan implementasi program serta memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai secara optimal.

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, Dalam teori M. Grindle, analisis kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor berfokus pada bagaimana berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan mempengaruhi proses dan hasil kebijakan. Kepentingan mencakup berbagai tujuan, harapan, dan kebutuhan yang dimiliki oleh aktor yang terlibat dalam kebijakan. Kepentingan ini sering kali mempengaruhi bagaimana mereka berpartisipasi dalam proses kebijakan. Penerima Manfaat memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa mereka menerima bantuan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah memiliki kepentingan dalam mencapai target pengentasan kemiskinan dan mendapatkan dukungan politik. Lembaga Implementasi seperti Dinas Sosial memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa program dilaksanakan dengan efektif dan sesuai anggaran. Strategi biasanya digunakan pemerintah mungkin menggunakan negosiasi dan lobbying untuk mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga lain dan pihak-pihak terkait. Dari penelitian ini hasil menunjukkan bahwa strategi pendamping PKH yakni membentuk kelompok P2K2 yang mana bertujuan untuk memudahkan dalam menginformasikan dan juga bersosialisasi. Dengan menganalisis kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari berbagai aktor, kita dapat lebih memahami dinamika yang mempengaruhi pembuatan dan implementasi kebijakan serta bagaimana kebijakan dapat dijalankan secara efektif.



Dalam teori M. Grindle, karakteristik lembaga dan penguasa adalah dua komponen penting yang mempengaruhi implementasi dan hasil kebijakan. Karakteristik Lembaga, Lembaga dalam konteks teori Grindle merujuk pada struktur, organisasi, dan prosedur yang ada di dalam sistem pemerintahan atau organisasi yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Karakteristik Penguasa, Penguasa dalam konteks teori Grindle merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam peneliti ini menunjukkan karakteristik lembaga terhadap implementasi PKH dapat diketahui bahwa di desa Sukoejo biasanya menyarankan orang terdekatnya sendiri. Maka kemampuan mengontrol dan mengarahkan itu sangat penting Kemampuan penguasa untuk mengontrol atau mengarahkan pelaksanaan kebijakan, termasuk mempengaruhi anggaran, sumber daya, dan prioritas. Respons Terhadap Umpan Balik juga sangat berpengaruh, Kemampuan penguasa untuk menanggapi umpan balik dan kritik dari publik, lembaga lain, atau pemangku kepentingan, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan memahami karakteristik lembaga dan penguasa, kita dapat lebih baik memahami dinamika yang mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta bagaimana berbagai faktor dapat mempengaruhi hasilkebijakan.

Kepatuhan dalam teori Grindle merujuk pada sejauh mana aktor yang terlibat dalam kebijakan mematuhi aturan, prosedur, dan standar yang ditetapkan. Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk desain kebijakan, kekuatan pengawasan, dan kultur organisasi. Dalam penelitian ini hasil menunjukkan bahwasannya kepatuhan pemerintahan ataupun pendamping sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi daya tanggap dari masyarakat sendiri memuaskan yanag mana biasanya kurang merespon petugas dengan baik. umpan balik dari penerima manfaat dan pendamping tentang tantangan yang dihadapi atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Dengan memahami dan mengelola kepatuhan serta daya tanggap, pelaksanakebijakan dapat memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan dengan baik, adaptifterhadap perubahan, dan mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengimplementasian program keluarga harapan (PKH) dalam pengentaskan kemiskinan. Peningkatan atau penambahan keluarga penerima manfaat (KPM) di dasari oleh penambahan kuota yang telah di lakukan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Maka bisa dikatakan di desa Sukorejo mengentas kemiskinan. Banyak dari keluarga penerima manfaat PKH yang awalnya hidup dalam keterbatasan, memiliki anak-anak yang terancam terjebak dalam siklus kemiskinan. Namun, dengan adanya bantuan PKH, mereka mendapatkan berbagai macam dukungan, mulai dari bantuan tunai langsung hingga akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Bantuan ini memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka dan masa depan anak-anak mereka. Misalnya, anak-anak dari keluarga PKH dapat mengakses pendidikan yang lebih baik karena adanya bantuan PKH. Ini penting karena pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang dan meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Dengan adanya bantuan untuk biaya sekolah, mereka bisa melanjutkan pendidikan tanpa terhambat oleh masalah finansial. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Sukorejo 1. Faktor Pendukung

Sumber daya manusia dilihat dari pendampingan, Pendamping PKH memainkan peran penting dalam pelaksanaan program di lapangan. Mereka bertugas memfasilitasi, memantau, dan memberikan bimbingan kepada keluarga penerima manfaat. Kualitas dan keterampilan pendamping dalam menjalankan tugasnya sangat berpengaruh pada efektivitas program.

Koordinasi dan kerjasama dalam pengimplementasian program PKH juga sangatlah mendukung bejalannya proses implementasinya PKH yang di berikan terhadap masyarakat seperti kerjasama antar petugas PKH dengan masyarakat dalam hal ini bisa dilihat dalam kumpulan kelompok-kelompok p2k2 maka tidak akan ada yang tertinggal informasi.



2. Faktor Penghambat

Sumber daya manusia ditinjau dari kesadaran masyarakat (penerima) juga berpengaruh dalam hal implementasi program keluarga harapan yang mengakibatkan penghambat dalam proses pengimplementasian dan dibuktikan dengan adanya masyarakat yang SDM nya rendah terkadang mendapatkan undangan dari petugas PKH tetapi beliau tidak menghadirinya, orang tua (lansia) yang sudah tidak memahami hal apapun termasuk system transfer ataupun kalo ada pengambilan yang dari pos.

Kurangnya kepatuhan dari penerima manfaat atau pihak terkait terhadap syarat-syarat program dapat mengurangi efektivitas PKH. Dengan memahami dan mengatasi masalah ketidakpatuhan dan ketertiban, PKH dapat diimplementasikan dengan lebih efektif, memberikan manfaat yang lebih besar kepada penerima manfaat, dan mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ditinjau dari 2 poin dapat ditarik kesimpulan.

1. Hasil dari penelitian tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Sukorejo ini menunjukkan bahwa: Pertama, Isi Kebijakan pengimplementasian Program PKH merupakan kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan yang digunakan untuk mengurangi atau memutus rantai kemiskinan untuk meningkatkan SDM Keluarga Penerima Manfaat. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, kesenjangan social sehingga dapat mempercepat derajat perubahan perilaku dan kemandirian KPM. Untuk kedudukan kebijakan PKH melibatkan pemerintahan daerah dimulai dari RT/RW, Kasun, Pemerintahan Desa. Maka dengan adanya PKH Sumber Daya Manusia di Desa Sukorejo cukup membantu untuk pengentasan kemiskinan. Untuk menjadi penerima PKH harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Ibu hamil, anak sekolah, lansia dan penyandang disabilitas. Kedua, Konteks Implementasi: Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukorejo adalah kepentingan, strategi, dan lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan. Berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang dalam pengimplementasian pemerintahan Desa sudah melakukan sesuai prosedur dan kebijakan. Dalam hal ini pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru yakni adanya penambahan kuota buat Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari kebijakan tersebut pemerintahan desa menanggapi dan sudah menambah usulan data KPM sesuai kriteria komponen-komponen yang telah ditentukan oleh Pemerintahan Pusat. Meskipun pemerintah sudah melaksanakan dan mensosialisasikan Program Keluarga Harapan (PKH), Tetapi masih ada komponen yang merasa kurang faham dengan menggunakan kartu ATM yang sudah di berikan kepada Komponen tersebut. Sehingga komponen tersebut meminta bantuan dari tetangganya. 2. Faktor penghambat implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Sukorejo yaitu kurangnya pendampingan dari pihak desa untuk membantu warganya yang gaptek, sehingga mereka meminta bantuan ke tetangga terdekat, dari data yang sudah di usulkan terkadang yang layak mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan karena belum terdeteksi dari Dinas Sosialnya, hal ini bisa diakibatkan karena orang tersebut ada pecah KK atau pindah domisili.

3. Faktor pendukungnya yaitu dengan dikasihnya kartu ATM tiap individual penerima PKH, maka akan lebih signifikan sehingga tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Pengimplementasian Pemerintahan Desa sudah baik hal ini bisa dilihat dari kinerjanya.



DAFTAR PUSTAKA

Anderson. James. E. (1994). *Public Policy Making: An Introduction* 7th Edition. Boston: Wadsworth

Edward III, George. 1980. *Implementing Public Policy*. First Edition. CQ Press. USA.

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementations in the Third World*, New jersey: Princetown University Press.

Hasdiana, U. (2018). *Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Implementasi PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan*. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5.

Ibrahim, N. R. M. S. M. W. (2023). *Pelaksanaan PKH Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 1–23.

Latare, S., Harold, R., Bumulo, S., & Ali, A. (2023). *Dampak Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Bangga Kecamatan Paguyaman Pantai*. *Dynamics of Rural Society Journal*, 1(1), 10–19. <https://doi.org/10.37905/drsj.v1i1.9>

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. PENANGGULANGAN KEMISKINAN KELURAHAN SISIR KECAMATAN

BATU KOTA BATU Liahati, U. DI, & Citra Larasati, D. (2018). *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam*. *Jisip*, 7(2), 40. www.publikasi.unitri.ac.id

Putri, N. A., & Purnaweni, H. (2022). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bojonegoro*. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(3), 510–522.

Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu*. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>